

Judul : Imbas konflik Timteng, waspadai lonjakan biaya produksi tani
Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Imbas Konflik Timteng

Waspadai Lonjakan Biaya Produksi Tani

ANGGOTA Komisi IV DPR Hindun Anisah mendesak Pemerintah segera memitigasi sektor pertanian dari dampak eskalasi konflik Timur Tengah (Timteng). Pasalnya, gangguan rantai pasok global di wilayah itu bisa memicu lonjakan biaya produksi tani jelang musim tanam tiba.

Konflik di Timteng, menurut Hindun, bukan lagi sekadar isu geopolitik, melainkan ancaman nyata bagi ketersediaan pangan nasional. Para petani akan menanggung beban biaya produksi yang sangat tinggi. Kondisi ini bahkan bisa membuat target swasembada pangan nasional yang dirancang Pemerintah gagal.

Meskipun Indonesia mengimpor bahan baku dari Eurasia, sambungnya, tekanan harga pasar global tetap tidak bisa dihindari. Data terbaru menunjukkan harga pupuk nitrogen global meningkat 32,4 persen. "Di saat yang sama, harga urea melonjak hingga 50 persen sejak konflik di kawasan itu berlangsung," urangnya, kemarin.

Hambatan logistik, kata Hindun, tentu saja jadi kekhawatiran utama, karena sepertiga perdagangan pupuk global melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur laut itu berpotensi memperparah kelangkaan pasokan dalam negeri. Situasi itu akan sangat memburakan kondisi ekonomi para petani, terutama skala kecil.

Kelangkaan pupuk, lanjut Hindun, memaksa petani me-

ngurangi penggunaan nutrisi tanaman atau bahkan menunda masa tanam. Dampak berikutnya adalah penurunan produktivitas nasional secara signifikan. "Jangan sampai saat musim tanam tiba, pupuk justru langka atau harganya jadi tidak terjangkau bagi masyarakat," ingatnya.

Selain itu, kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global juga akan menekan margin kesejahteraan petani. Sebagai solusi strategis, Pemerintah didorong memperkuat cadangan nasional dan mempercepat pengembangan pupuk dalam negeri. Langkah ini dilakukan agar stok pangan rakyat tetap aman dan stabil.

Hindun menyarankan optimalisasi sumber daya lokal, seperti penggunaan pupuk organik serta pemanfaatan energi terbarukan. Penggunaan panel surya dan biogas bisa menekan biaya operasional alat mesin pertanian. "Ketahanan pangan tidak boleh bergantung pada kondisi global yang saat ini tidak menentu," ucap legislator PKB itu.

Senada, anggota Komisi VI DPR Zulfikar Hamonangan mengingatkan konflik AS-Israel, dan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Harga energi serta bahan baku pupuk dunia biasanya ikut naik. Dampak kenaikan itu langsung dirasakan petani karena biaya produksi meningkat tajam.

Kondisi itu berisiko membuat



Hindun Anisah

para petani terpaksa menunda atau bahkan mengurangi masa tanam mereka. Jika demikian, produktivitas nasional berpotensi turun dan memicu kenaikan harga pangan di pasar. "Berbagai jenis komoditas sayur-sayuran akan terkena dampak langsung akibat kenaikan biaya operasional petani," tegas Zulfikar.

Tekanan terhadap sektor pertanian, kata dia, diperparah oleh potensi kenaikan harga BBM akibat ketidakstabilan geopolitik global. Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk membuat sektor ini rentan. Selama masih bergantung pada impor, tiap krisis global akan langsung berdampak pada produktivitas dalam negeri.

Zulfikar juga menyoroti distribusi pupuk bersubsidi yang masih sangat rentan terhadap praktik mafia di lapangan. Sekitar 2.000

kios pupuk pernah ditutup akibat dugaan penyimpangan distribusi. Kondisi itu menunjukkan bahwa tata kelola distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia masih perlu untuk segera dibenahi.

Untuk itu, Pemerintah harus memperkuat pengawasan distribusi sekaligus meningkatkan produksi bahan baku pupuk dalam negeri. Komisinya akan terus mengawal kebijakan industri nasional agar petani tidak dirugikan. "Gejolak global tidak boleh mengorbankan nasib para petani kecil yang sedang berjuang," ujar politikus Demokrat itu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk tergolong sangat tinggi. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan ada 27,8 juta rumah tangga yang terlibat dalam usaha pertanian. Sekitar 17,2 juta di antaranya merupakan petani kecil yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional produksi.

Impor pupuk Indonesia mencapai 7,52 juta ton pada 2024 dengan nilai 1,98 miliar dolar AS atau sekitar Rp 32,17 triliun. Pasokan impor berasal dari berbagai negara seperti China, Rusia, Kanada, Mesir, hingga Yordania. Kondisi itu membuat harga domestik sangat rentan terhadap gejolak geopolitik serta dinamika pasar dunia saat ini.

Peneliti pertanian dari The Hightower Report Randy Place sebelumnya menyebutkan, seluruh

negara kini berlomba mencari pasokan. Pasalnya, pupuk berperan menjaga produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan gandum. Gangguan pasokan bisa langsung berdampak buruk pada hasil panen serta ketersediaan stok pangan nasional.

Sekretaris Perusahaan PT. Pupuk Indonesia Yehzekiel Adiperwira memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman di tengah dinamika geopolitik. Kapasitas produksi mencapai 14,5 juta ton per tahun untuk berbagai jenis pupuk. Bahkan, produksi urea domestik diklaim mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani di dalam negeri sekarang.

Ketergantungan bahan baku terhadap kawasan konflik relatif terbatas karena fosfat serta kalium berasal dari Afrika dan Laos. Meskipun sulfur dipasok dari Timteng, Pemerintah sudah menyiapkan alternatif dari Kanada. Stabilitas pasokan tetap terjaga sehingga belum diperlukan langkah ekstrem seperti melakukan pembatasan ekspor.

Terkait hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Pemerintah berencana mengalihkan sumber impor bahan baku pupuk dari negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan hingga Uzbekistan. Langkah itu diambil karena kawasan Eurasia memiliki potensi besar untuk menggantikan pasokan lama yang berasal dari Eropa Timur. ■ PYB